

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017  
 PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

1	2	TARGET	
		3	4
<b>A. Pengawasan</b>			
<b>1. Sasaran Program</b>			
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55
	1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40
	2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70
	2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh KLP/K	%	60
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	70
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	4.1 Persentase KLP/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50
5. Meningkatnya kepedulian KLP/K dan masyarakat terhadap korupsi	5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100
	6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	30
	6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	40
	6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	30
	6.5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	54
	6.6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	60
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100
	7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	20
	7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	60
	7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	20
<b>2. Sasaran Kegiatan</b>			
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	1.1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP	laporan	92

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di provinsi/ kota/ kabupaten	2.1 LHP Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	laporan	16
	2.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di provinsi/ kota/ kabupaten	surat	11
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di provinsi/ kota/ kabupaten	3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	laporan	12
	3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP diprovinsi/ kota/ kabupaten	surat	11
<b>B. Dukungan</b>			
<b>1. Sasaran Program</b>			
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	7
<b>2. Sasaran Kegiatan</b>			
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	41
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2.1 Tersedianya sarana prasarana BPKP	unit	1
<b>C. Anggaran</b>			
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP		Rp	1.421.375.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP		Rp	9.403.811.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP		Rp	430.988.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana		Rp	240.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>11.496.174.000,00</b>

  
 Kepala BPKP  
  
 Ardan Adiperdana  
 NIP 19590616 197911 1 001

Jakarta, 19 Januari 2017  
 Kepala Perwakilan,  
  
 Indra Khaira Jaya  
 NIP 196812311993031001

PERJANJIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2017  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Pengawasan</b>							
<b>1. Sasaran Program</b>							
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/ korporasi	1.1 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	20	35	50	55	55
	1.2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	0	20	35	55	55
2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	2.1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	0	0	0	40	40
	2.2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	0	0	0	70	70
	2.3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	0	60	60
3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	3.1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	0	0	0	70	70
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	0	0	0	50	50
5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	5.1 Persentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	0	0	0	60	60
6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi	6.1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	0	0	0	100	100
	6.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	0	0	10	30	30
	6.3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	0	0	20	40	40
	6.4 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 1)	%	0	10	20	30	30
	6.5 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	0	20	40	54	54
	6.6 Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	0	0	30	60	60

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	7.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	0	0	100	100	100
	7.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	0	0	10	20	20
	7.3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	40	50	50	60	60
	7.4 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	60	50	40	20	20
<b>2. Sasaran Kegiatan</b>							
1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	1.1 Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP	laporan	28	29	29	6	92
2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di provinsi/ kota/ kabupaten	2.1 LHP Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	laporan	0	2	9	5	16
	2.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di provinsi/kota/ kabupaten	surat	0	3	4	4	11
3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di provinsi/ kota/ kabupaten	3.1 LHP Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	laporan	3	3	3	3	12
	3.2 Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di provinsi/ kota/ kabupaten	surat	2	3	3	3	11
<b>B. Dukungan</b>							
<b>1. Sasaran Program</b>							
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	1.1 Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	0	0	0	7	7
<b>2. Sasaran Kegiatan</b>							
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	7	7	12	15	41
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal	2.1 Tersedianya sarana prasarana BPKP	unit	1	0	0	0	1

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Trw I	Target Trw II	Target Trw III	Target Trw IV	Target Setahun
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>C. Anggaran</b>							
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP		Rp	361.846.300	370.288.550	456.104.600	233.135.550	1.421.375.000
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP		Rp	1.997.866.100	2.118.519.100	3.229.232.250	2.058.193.550	9.403.811.000
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP		Rp	72.908.200	80.627.600	124.916.400	152.535.800	430.988.000
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana		Rp	240.000.000	-	-	-	240.000.000
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>2.672.620.600</b>	<b>2.569.435.250</b>	<b>3.810.253.250</b>	<b>2.443.864.900</b>	<b>11.496.174.000</b>

Jakarta, 19 Januari 2017


  
Kepala BPKP,
   
*Ardan Adiperdana*
  
Ardan Adiperdana
   
NIP.19590616 197911 1 001


  
Kepala Perwakilan,
   
*Indra Khaira Jaya*
  
Indra Khaira Jaya
   
NIP.19681231 199303 1 001